

**RESISTENSI GERAKAN MAHASISWA TERHADAP KAPITALISASI PENDIDIKAN
(Studi Organisasi Eksternal Kampus di Unesa)**

Moh. Taufik

Program Studi S-1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
taufikjuang@yahoo.com

M. Arif Affandi

Program Studi S-1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
intermilaniacs@gmail.com

Abstrak

Keterlibatan kaum intelektual dalam dunia gerakan sosial merupakan sebuah respon terhadap kondisi sosial ekonomi maupun politik yang dirasa masih belum bisa mensejahterakan rakyat. Penelitian ini mengkaji bentuk resistensi gerakan mahasiswa terhadap kapitalisasi pendidikan. Penelitian ini menggunakan konsep kekuasaan dari Michel Foucault dan teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti memiliki subjek yakni para fungsionalis organisasi ekstra kampus SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia) dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Teknik pemilihan informan yaitu dengan cara *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan *in-dept interview*. Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini terdapat beberapa organisasi ekstra kampus yang melakukan resistensi yang didasarkan atas adanya kapitalisasi pendidikan. Selanjutnya adalah bentuk resistensi yang dilakukan melalui pembentukan konsolidasi dari beberapa organisasi ekstra kampus dengan melakukan diskusi-diskusi mengenai situasi kampus hingga membentuk sebuah aliansi sebagai persatuan antar organisasi ekstra kampus yang kemudian menyikapi dengan penempelan pamflet, pembagian selebaran, dan aksi demonstrasi. Terakhir adalah adanya upaya untuk melemahkan gerakan mahasiswa dengan hegemonisasi yang dilakukan birokrasi kampus dengan cara pewacanaan mahasiswa liar, wacana Unesa yang akan menjadi *world class university*, banyaknya pembangunan infrastruktur, perkuliahan kewirausahaan, sistem kurikulum yang kompetitif, hingga konflik horizontal dengan organisasi intra kampus.

Kata Kunci: Organisasi Ekstra, Birokrasi kampus dan Resistensi.

Abstract

The involvement of intellectuals in the social movement world is a response to the socio economic and political conditions that it is still not able to prosper the peoples. This study examines form the resistance the student movement against the capitalization of education. This study uses the powers concept from Michel Foucault and hegemony theory from Antonio Gramsci. This study uses qualitative research methods. Researcher have a subject that is the functionalist extra campus organization SMI (Indonesian student union) and GMNI (Indonesian national student movement). Informant selection techniques is with manner *purposive*. Data collection techniques using observation and *indept interview*. Method data analysis techniques with a qualitative descriptive. The results of this study, there are several extra-campus organizations that perform resistance based on the existence of education capitalization. next is form of resistance that is done through the establishment of the consolidation of several extra-campus organizations to conduct discussions on the situation of the campus to form an alliance as a union between extra-campus Organization then respond with sticking pamphlet, leaflet distribution, and demonstrations action. Last is there effort to weaken the student movement performed by bureaucratic campus with a wild student discourse, discourse Unesa which will be a world class university, the many of infrastructure development, entrepreneurship classes, competitive curriculum system, up to horizontal conflicts with intra-campus organizations.

Keywords: Extra Organization, Bureaucracy campus and Resistance.

PENDAHULUAN

Gerakan mahasiswa merupakan sebuah perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses dealektika panjang setiap negara, khususnya di Indonesia. Keikutsertaan mahasiswa dalam mengontrol hingga proses perubahan dari setiap gerak perjalanan bangsa merupakan sebuah lukisan yang tidak dapat dihilangkan dari memori sejarah bangsa. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa mendapatkan tugas nurani untuk selalu bertanggung jawab atas situasi sosial, ekonomi dan politik bangsa.

Dalam dunia pendidikan perlu dipahami pendidikan yang sudah terkapitalisasikan merupakan proses menjadikan pendidikan yang berorientasi pada *capital* atau *profit oriented* dan bisnis. maka jalannya pendidikan tidak lagi menjadi prioritas utama yang akan menjadi fokus adalah untung dan rugi. Dalam pandangan Marxis bahwa sejalan dengan makin matangnya kapitalisme, proses proletarianisasi makin meningkat, dimana makin banyak bagian dari golongan borjuasi menjadi proletariat karena terjadi proses konsentrasi kapital (M Dawan Raharja, 1987:1). Dalam penerapannya kapitalisasi pendidikan khususnya di Unesa bisa dilihat dari bentuknya yaitu: liberalisasi pendidikan, privatisasi pendidikan dan komersialisasi pendidikan.

Pertama, liberalisasi pendidikan yang dimaksud adalah melepaskan pendidikan kearah pasar bebas, dimana hal ini pemerintah sebagai fasilitator melepaskan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam dunia pendidikan nasional dapat dipahami pada berkembang pada era perdagangan bebas saat ini bahwa semua negara yang menjadi anggota WTO (*World Trade Organisation*) yang sudah menanda tangani GATS (*General Agreement on Trade in Services*) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa antara lain: layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan, serta jasa-jasa lainnya akan terus “ditekan” agar secepatnya melaksanakan kesepakatan yang diambil dalam berbagai macam konferensi dan perundingan tingkat tinggi yang mengatur masalah perdagangan bebas barang dan jasa tersebut.

Konsekuensi dari komitmen Indonesia dalam WTO, yang juga diikuti dengan kesertaan dalam

menandatangani GATT (kesepakatan WTO berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa), AFAS (*ASEAN Framework on Services*), itu artinya Indonesia juga harus mengikat diri untuk ikut pada putaran-putaran lanjutan yang mendorong negara peserta untuk membuka pasar domestiknya secara lebih lebar dan lebih cepat agar bisa lebih mudah diakses pelaku industri dari negara lain, dan pada akhirnya menghapus semua hambatan perdagangan barang dan jasa. Sejak Indonesia menjadi anggota WTO, secara otomatis semua hasil perjanjian yang berhubungan dengan perdagangan multilateral, diratifikasi menjadi UU No 7/1994 sebagai prasyaratnya agar lalu lintas perdagangan barang dan jasa dari Indonesia bisa bersaing dan diterima di pasar bebas.

Perjanjian tersebut mengatur tata cara perdagangan barang, jasa, dan TRIPS (*Trade Related Intellectual Property Rights*) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam bidang jasa, yang masuk sebagai obyek pengaturan WTO adalah semua komoditas jasa, tanpa terkecuali bidang pendidikan. Dari kondisi diatas, bisa dilihat begitu besarnya kepentingan para pemodal asing terhadap dunia pendidikan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung karena dunia pendidikan merupakan ladang bisnis yang sangat menjanjikan di kemudian hari.

Kedua, privatisasi pendidikan. Ketika pendidikan dileneralakan maka muncullah privatisasi pendidikan dimana segala kebijakan, pengelolaan dan hak dalam kepengurusan administrasi pendidikan diberikan sepenuhnya kepada pihak penyelenggara pendidikan (otonom). Kemudian instansi pendidikan akan berkompetisi untuk mencari dan adengan membuat usaha mandiridan mencari dana talangan ke para pemodal untuk membiayai pendidikan, hal ini yang menyebabkan intervensi para lembaga keuangan seperti: WTO (*World Trade Organisation*), World Bank, CGI (*consultative group for indonesian*), IDB (*Islamic development bank*), ADB (*asian developmen bank*), IMF (*International monetary fund*) untuk ikut andil dalam terselenggaranya pendidikan di Indonesia.

Privatisasi pendidikan di Unesa terbukti dengan adanya usaha mandiri seperti: menjual air mineral, penyewaan kolam renang dan hadirnya investor *Islamic Development Bank* (IDB) sebagai

peremberi dana talangan untuk pembangunan infrastruktur berbentuk gedung laboratorium di setiap fakultas, kemudian juga kerjasama dengan *Bank Tabungan Nasional (BTN)* dan juga *Bank Nasional Indonesia (BNI)* untuk mengelola administrasi keuangan.

Ketiga, komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan yaitu menjadikan pendidikan sebagai ajang bisnis barang komoditas yang bisa dijual belikan. Ini yang akan membuat kesenjangan dalam bidang pendidikan. Dampak dari komersialisasi pendidikan salah satunya adalah penjualan jasa pendidikan dan meningkatnya biaya pendidikan. Bila hal ini terjadi maka pendidikan tinggi akan menjadi milik segelintir orang saja yang memiliki kelebihan uang. Oleh karena itu, bukanlah hal yang aneh bila masih banyak anak-anak pedesaan, anak buruh tani maupun kaum miskin kota yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Ini menunjukkan kecenderungan bertambahnya mahasiswa yang kaya dan wajar bila timbul sinisme orang miskin dilarang sekolah.

Peran pemodal asing yang masuk dalam sektor pendidikan, sama hanya sebuah saham perusahaan yang ditanamkan mengakibatkan instansi pendidikan harus mengembalikan uang pinjaman tersebut. Dapat dilihat dengan munculnya PERPRES RI No. 77 tahun 2007 mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan penanaman modal. Peraturan tersebut tercantum bahwa pendidikan formal maupun non-formal dapat dimasuki oleh modal asing hingga 49%. Dana yang diberikan tidak akan cuma-cuma diberikan namun, dana tersebut akan dikembalikan kemudian hari baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Tentunya materi ataupun yang akan dikembalikan tidak sebesar yang telah diberikan tidak sebesar yang telah diberikan tetapi akan lebih besar lagi dengan mengorbankan anak didik ataupun kembali lagi masyarakat/orang tua yang akan menanggung beban tersebut, ini yang akan mengakibatkan adanya diskriminasi dalam pendidikan antara kelas atas dengan kelas bawah.

Praktek komersialisasi pendidikan di Unesa terlihat dengan jelas pada biaya SDP (Sumbangan Dana Pembangunan) untuk registrasi mahasiswa baru dan biaya SPP setiap semester yang setiap tahun mengalami peningkatan hingga pungutan liar seperti di jurusan teknik mesin FT Unesa yang harus membayar sejumlah uang untuk keperluan

PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) dan pungutan liar untuk biaya kuliah praktek.

Praktek kapitalisasi diatas didukung dengan adanya kurikulum yang diajarkan didasarkan pada tingkat permintaan dan keinginan para pemodal. Kurikulum akan dengan mudah memasukkan mata kuliah tertentu yang berisi ide-ide kapitalisme yang bertujuan untuk mencetak agen-agen kapitalis di Indonesia. Dalam konteks Unesa, kurikulum yang yang berbasis kapitalistik bisa dilihat dari kurikulum kompetitif, dimana anak didik harus dituntut untuk bisa bersaing dengan mahasiswa yang lain, yang ini sama halnya dengan perpektif kapitalisme yaitu persaingan pasar bebas.

Munculnya beberapa Gerakan Mahasiswa di Unesa tidak lain adalah untuk mengkritisi bahkan memunculkan perlawanan terhadap berbagai masalah yang menyangkut kehidupan kampus yang sering dianggap tidak berpihak terhadap mahasiswa (kapitalisasi pendidikan). Kepedulian dalam merespon masalah-masalah sosial politik yang terjadi dan berkembang ditengah masyarakat khususnya di lingkungan akademiknya. Bahkan, bisa dikatakan bahwa gerakan mahasiswa seakan tidak pernah absen dalam meresponi setiap kegiatan politik yang dilakukan penguasa.

Kehadiran gerakan mahasiswa di Unesa ini sebagai perpanjangan aspirasi rakyat sebagai upaya pemberdayaan kesadaran politik rakyat khususnya kaum akademisi dan perlawanan atas kapitalisasi pendidikan. Secara umum, perlawanan yang dilakukan lebih ditunjukkan pada upaya penguatan posisi tawar mahasiswa maupun tuntutan-tuntutan atas kapitalisasi pendidikan yang terjadi menjadi lebih signifikan. Dalam memainkan peran yang demikian itu, motivasi gerakan mahasiswa lebih banyak mengacu pada panggilan nurani atas kepeduliannya yang mendalam terhadap isu-isu sosial, ekonomi dan politik.

KAJIAN TEORI

Michel Foucault dalam Konsep kekuasaan

Kekuasaan adalah sebuah kemampuan seseorang untuk mengintervensi orang lain agar mengikuti terhadap apa yang diinginkan oleh pihak penguasa. Didalam bahasa Michel Foucault, kekuasaan adalah upaya untuk mendisiplinkan individu-individu melalui norma-norma yang ditentukan oleh penguasa. Melalui mekanisme disiplin dan norma, maka individu menjadi patuh terhadap kekuasaan.

Kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara atau sesuatu yang dapat diukur namun, kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan (K. Bertens, 2001:307).

Kekuasaan dan pengetahuan kedua memiliki relasi yang saling berkaitan. Tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan, begitu juga sebaliknya tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan, dengan pengetahuan maka kekuasaan akan beroperasi (K. Bertens, 2001:300).

Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung dimana-mana dan disana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi (K. Bertens, 2001:319).

Dengan demikian, lembaga pendidikan formal (dalam konteks ini kampus), juga menjadi bagian dari sistem sosial yang terlibat dalam pembentukan disiplin terhadap individu-individu. Di samping itu, lembaga pendidikan yang idealnya menjadi ajang pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran mahasiswa menjadi makhluk sosial dan politik juga seringkali menjadi mesin penguasa untuk menanamkan ideologi para penguasa, sehingga kekuasaannya tidak terganggu. Dalam analisisnya, Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bukan melahirkan kepatuhan, melainkan justru melahirkan resistensi. Tidak ada kuasa yang bebas dari oposisi, di mana ada kuasa disitulah resistensi akan lahir (K. Bertens, 2001:324).

Pemikiran Foucault dalam konteks gerakan mahasiswa, bagaimana kekuasaan dalam hal ini birokrasi kampus untuk melarang itu justru melahirkan resistensi. Semakin kuat kekuasaan itu menghegemoni untuk berkuasa, maka dengan sendirinya semakin besar peluang untuk terjadinya resistensi. Sehingga dalam konteks ini resistensi merupakan anak kandung dari kekuasaan. Dengan demikian resistensi yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap kebijakan kampus Unesa, seperti penolakan-penolakan terhadap biaya kuliah yang tiap tahun ajaran baru meningkat. Sebagai gambaran beroperasinya mesin kekuasaan kampus ketika terjadi resistensi dari organisasi ekstra

kampus terhadap kekuasaan birokrasi kampus unesa.

Ada tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan ideologis, kekuasaan remuneratif, dan kekuasaan punitif. Kekuasaan ideologis dengan indoktrinasi dan berbagai bentuk rekayasa pikiran merupakan wujud pengungkapan kekerasan psikologis. Kekuasaan remuneratif dengan memberikan jabatan, kedudukan, korupsi atau kolusi dan seterusnya sebenarnya melakukan sebuah kekerasan fisik dan psikologis sekaligus. Sementara kekuasaan punitif sama dengan remuneratif, yaitu melahirkan bentuk kekerasan fisik dan psikologis, berupa penyiksaan, penganiayaan, ancaman, tekanan, dan sejenisnya (Adian, Donny Gahral, 2011:102).

Dalam konteks di Unesa terdapat kekuasaan punitif yang berbentuk ancaman dan tekanan bagi mahasiswa yang terlibat aktifitas organisasi ekstra kampus. Secara umum bisa dikatakan bahwa birokrasi Unesa sebagai pemegang kekuasaan yang dipimpin oleh rektor sebagai pemegang kekuasaan adalah suatu kekuatan yang dimiliki birokrasi atau seseorang rektor yang dengannya dia mampu mengatur, mengendalikan, bahkan memaksakan kebijakan kampus kepada mahasiswa. Dengan kekuasaan birokrasi Unesa adalah bahwa seorang rektor atau sistem birokrasi Unesa dianggap memiliki kekuasaan ketika mereka telah berhasil menciptakan kehidupan mahasiswa dalam rasa keterpaksaan maupun ketidak paksaan untuk tunduk-patuh terhadap kebijakan atau pada suatu sistem politik birokrasi Unesa. Fenomena adanya resistensi dari beberapa kelompok mahasiswa yang mengatas namakan organisasi SMI dan GMNI dengan melakukan kritikan hingga aksi terhadap birokrasi Unesa, baik dalam bentuk reaktif-dialogis ataupun dalam bentuk reaktif-anarkis. Hal ini merupakan indikasi bahwa mahasiswa yang mengatas namakan SMI dan GMNI itu tidak ingin begitu saja dikuasai atau patuh oleh pihak birokrasi kampus.

Dalam fenomena resistensi yang dilakukan organisasi ekstra kampus SMI dan GMNI, kekuasaan dapat dimengerti dalam penggunaan kekerasan suatu pihak atas pihak lain. Otoritas seorang rektor atau birokrasi Unesa yang memperlakukan mahasiswa atau organisasi ekstra maupun intra kampus sebagai objek kekuatannya. Relasi kekuatan yang diproduksi birokrasi Unesa bisa dianalogikan seperti hubungan majikan dengan

budak, atau hubungan atasan dan bawahan. Pemakaian kata budak menunjukkan pihak mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan sebagai pihak yang tidak berdaya, lemah, dan tertindas. Budak merupakan penggambaran pengebirian kebebasan untuk melakukan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan kampus.

Resistensi gerakan mahasiswa sebagai bentuk pemberontakan dan protes terhadap tekanan yang dipaksakan birokrasi kampus Unesa mengindikasikan bahwa pada dasarnya tidak suka dibatasi dan dibelenggu oleh orang lain. Perlawanan dari pihak gerakan mahasiswa terhadap pembatasan dan pembelengguan oleh pihak lain merupakan upaya alamiah untuk ikut andil dalam kekuasaan birokrasi kampus demi mendapatkan kebebasan menyampaikan pendapat didalam kampus terlebih ikut dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan kampus.

Antonio Gramsci dalam Teori Hegemoni

Hegemoni didefinisikan Gramsci sebagai kepemimpinan budaya yang dilaksanakan oleh kelas yang berkuasa. Dia mengontraskan hegemoni dengan paksaan atau tanpa paksaan yang dilaksanakan oleh kekuatan legislatif atau eksekutif, atau diungkapkan melalui campur tangan polisi. Gramsci menekankan "hegemoni" dengan "kepemimpinan budaya". Didalam analisis kapitalisme, Gramsci ingin mengetahui bagaimana sejumlah intelektual yang bekerja di pihak kapitalis mencapai kepemimpinan budaya dan persetujuan massa (George Ritzer, 2012:476). Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus (*consenso*) dari pada melalui penindasan terhadap kelas sosial lain. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat itu. Itulah sebabnya hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana upaya yang dilakukan birokrasi kampus Unesa dalam proses hegemoni kepada mahasiswa terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan seperti adanya kebijakan BPKP, UKT dan masuknya IDB kedalam kampus Unesa sehingga dapat memperlemah resistensi gerakan mahasiswa terhadap bentuk-bentuk kapitalisasi pendidikan.

Ada cara yang dilakukan birokrasi unesa untuk melakukan higemonisasi melalui organisasi intra kampus untuk dapat menginternalisasikan nilai-nilai kesadaran menurut birokrasi kampus sehingga dapat memperlemah upaya resistensi yang dilakukan oleh organisasi ekstra kampus.

METODE

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan tujuan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena yang timbul di masyarakat. Alfred Schutz dalam pandangan fenomenologinya memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain sementara mereka hidup dalam aliran kesadaran mereka sendiri. Schutz menyebutkan adanya *because of motive* sebelum *in order to motive*. (George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2004:94). Penelitian ini dilakukan di kampus UNESA (Universitas Negeri Surabaya) Ketintang karena terdapat cukup banyak mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ekstra kampus yaitu SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia) dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

Subjek penelitian ditentukan secara *Purposive Sampling* dikarenakan orientasi penelitian yang dituju adalah para fungsional organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya atau mahasiswa aktivis SMI dan GMNI yang ada di UNESA Ketintang. Teknik pengumpulan data *pertama*, observasi atau pengamatan secara langsung terhadap berbagai realitas yang terpengaruh dan dipengaruhi oleh fenomena dilapangan. *Kedua*, *indepth interview* digunakan untuk menggali data sedalam-dalamnya. Kemudian mencatatnya dalam *file note* (catatan lapangan) (Burhan Bungin, 2003:67). Langkah melakukan *indept interview* antara lain dengan *getting in*. *Getting in* yang dilakukan adalah beradaptasi agar bisa diterima dengan baik oleh subjek penelitian.

Teknik Analisis data *pertama*, peneliti menalaah seluruh berbagai sumber dengan menggunakan pendekatan *fenomenologi*, yaitu melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang. *Kedua*, menganalisis data dengan menggunakan teori-teori yang telah dirumuskan oleh peneliti dalam daftar pustaka. *Ketiga*, peneliti akan menginterpretasikan data yang telah diolah dan diperoleh dilapangan dengan menggunakan metode *trianggulasi*. Trianggulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Lexy. J. Moleong, 2005: 330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Munculnya Resistensi Gerakan Mahasiswa.

Kapitalisasi Pendidikan

Adanya praktek kapitalisasi pendidikan dalam pendidikan semakin jauh dari hakikatnya, untuk mencerdaskan kehidupan manusia. Pendidikan sekarang lebih diarahkan pada keuntungan atau bisnis, sehingga peserta didik menjadi korban dari bentuk pendidikan seperti ini. Keadaan ini berawal ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi kampus melalui UU no. 61 tahun 1999, yang membuat kampus terpaksa harus mencari biaya sendiri, sehingga lahirlah konsep BLU (Badan Layanan Umum), mahasiswa yang menghendaki memakai fasilitas kampus berkonsekuensi harus mengeluarkan uang untuk pembiayaan perkuliahan.

Keadaan pendidikan pasca diliberalisasikan membuat pendidikan cenderung berorientasi pada modal. Kampus sebagai institusi pendidikan yang hanya mencetak robot-robot untuk dipekerjakan dan potensi kreativitas mahasiswa kurang diperhatikan. Adanya beberapa regulasi dalam melakukan liberalisasi disektor pendidikan merupakan konsekuensi dari peran pemerintah yang hingga saat ini ikut dalam pelaksanaan kebijakan mekanisme pasar bebas yang dipaksakan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sejak tahun 1994. Didalam WTO telah menyetujui GATS (*General Agreement on Trade in Services*), untuk tingkatan pendidikan yang akan diliberalisasi terdiri dari *Primary Education Services, Higher Education Services, Adult Education, Other Educations Services*. Kesepakatan konvensi WTO dan GATS tersebut diratifikasi pada tahun 2001. Sehingga negara Indonesia hingga ditingkatkan universitas tentu akan ikut serta menjalankan kebijakan liberalisasi disektor pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO mau tidak mau harus ikut dalam mekanisme didalamnya, termasuk membiarkan pendidikan sebagai salah satu sektor yang harus diliberalkan.

Dalam upaya liberalisasi dunia pendidikan dapat dilihat dari adanya UU no. 61 tahun 1999, yang substansinya berdampak terhadap hilangnya tanggungjawab negara dalam pendidikan. Dari

sinilah selanjutnya terjadi manajemen kampus menjadi otonomi kampus yang harus mandiri mengelola pendidikan sendiri. Kemudian pemerintah menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai badan hukum milik negara termasuk Unesa yang masuk dalam klarifikasi tersebut. Kemudian juga UU no. 20 tahun 2003 tentang SISDIKAS, juga ikut mengakibatkan pendidikan jatuh ketangan swasta atau privatisasi kampus. Selanjutnya adanya PP no. 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dalam persyaratan penanaman modal dan PP no. 77 tahun 2007 yang selanjutnya pada tahun 2010 diganti dengan perpres no. 36 tahun 2010, undang-undang tersebut tidak lain sebagai turunan dari UU Penanaman Modal Asing (PMA), UU no. 25 tahun 2007 yang semakin menegaskan praktik kapitalisasi pendidikan, dimana pendidikan dinyatakan sebagai salah satu sektor terbuka yang dapat ditanami oleh modal asing hingga 49 %. Sehingga pendidikan menjadi tempat untuk mencari keuntungan dan menjadi area bisnis para pemodal.

Ketika pendidikan dileberalkan maka muncullah privatisasi pendidikan dimana segala kebijakan, pengelolaan dan hak dalam kepengurusan administrasi pendidikan diberikan sepenuhnya kepada pihak penyelenggara pendidikan atau otonom. Kemudian institusi pendidikan (pendidikan tinggi) akan berlomba-lomba untuk mengumpulkan dana dengan membuat usaha mandiri dan mencari dana talangan kepada para pemodal untuk membiayai pendidikan demikian pula dengan kampus Unesa.

Hal tersebut juga diakui subjek Okto Setyo Bektu bahwa praktek privatisasi pendidikan di Unesa terbukti adanya usaha mandiri seperti: menjual air mineral Unesa, penyewaan kolam renang dan hadirnya investor *Islamic Development Bank* (IDB) sebagai pemberi dana talangan untuk pembangunan infrastruktur berbentuk gedung laboratorium di setiap fakultas, kemudian juga bekerjasama dengan *Bank Tabungan Nasional* (BTN), Bank Jatim, dan juga *Bank Nasional Indonesia* (BNI) untuk mengelola administrasi keuangan.

Menurut pemaparan subjek Dimas Anggara, adanya pembatalan UU BHP oleh MK karena dinilai inkonstitusional ternyata belum menghentikan praktik kapitalisasi pendidikan, karena walaupun UU BHP yang sangat sarat

dengan nilai liberalisasi, privatinisasi dan komersialisasi pendidikan, akan tetapi hadirnya PP no. 66 tahun 2010 sebagai pengganti dari UU no. 9 tahun 2009 tentang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan paket kebijakan yang melegalkan praktik komersialisasi pendidikan. Sehingga meskipun UU BHP di batalkan, biaya pendidikan pun tetap semakin mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Begitu juga fasilitas kampus yang dipakai mahasiswa untuk perkuliahan. Itu semua terjadi akibat dari pelepasan tanggungjawab pemerintah terhadap dunia pendidikan, termasuk dalam soal pendanaannya.

Dampak Kapitalisasi Pendidikan

Kapitalisasi pendidikan sangat berkaitan erat dengan perkembangan proses dialektika pendidikan di tingkat kampus. Komersialisasi pendidikan, liberalisasi pendidikan dan privatisasi pendidikan menjadi isu yang selalu hangat diperbincangkan mahasiswa sebagai elemen yang langsung merasakan dampaknya. Biaya pendidikan kampus yang mengalami kenaikan, merupakan akibat langsung dari praktik komersialisasi pendidikan. Pragmatisme akhirnya terjadi dalam dunia pendidikan dan hal itulah yang salah satunya menstimulus terbentuknya pola kesadaran mahasiswa. Mahasiswa sebagai kelompok yang menjadi korban dari kapitalisasi pendidikan kemudian mempunyai sikap terhadap kondisi pendidikan yang telah tereduksi oleh kepentingan dari sistem kapitalis.

Adapun ungkapan dari salah satu subjek Mukhamad Faris salah satu anggota SMI yang berpendapat bahwa perkembangan situasi pendidikan nasional sangat berpengaruh dampaknya terhadap kampus sebagai institusi pendidikan. Misalnya dengan logika kapitalisme, akibat dari kapitalisasi pendidikan, kampus semakin jauh dijangkau oleh orang miskin, termasuk sekarang yang terjadi di Unesa yang juga secara otomatis memakai logika bisnis, bukan logika pendidikan. Dengan logika demikian, dampaknya terhadap mahasiswa sangat luar biasa, misalnya sudah sangat jarang sekali kita temukan forum diskusi yang dibentuk mahasiswa, yang terjadi justru mahasiswa sekarang dipaksa cepat lulus dan segera kerja sehingga mahasiswa cenderung tidak peka terhadap persoalan yang ada, baik isu internal kampus maupun isu yang nasional.

Adanya bentuk kerja sama Unesa dengan lembaga keuangan yaitu *Islamic Development*

Bank (IDB) yang di mulai sejak penandatanganan antara rektor Unesa dengan Direktur IDB tahun 2013, digunakan sebagai tindak lanjut kampus dari usaha pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam dunia pendidikan. Hal tersebut juga dinyatakan oleh subjek Mudiono bahwa masuknya IDB ke kampus Unesa dengan dana IDB IDR 300 miliar Unesa akan membangun *e-learning* yang mampu jadi tuan rumah atau pusat pengembangan untuk 6 PT lain dari anggota 7 in 1 IDB, melatih staf (dosen dan karyawan), menyediakan peralatan (equipment), serta membangun beberapa gedung yakni pembangunan gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik, gedung Laboratorium Terpadu Sains FMIPA bersama gedung dekanat FMIPA yang sempat terbakar di kampus Ketintang. Selain itu, saat ini di kampus Lidah juga sedang dibangun gedung rektorat baru Unesa yang akan terintegrasi dengan perpustakaan didepan danau kampus Lidah dan gedung pusat kegiatan mahasiswa (*student centre*) yang berada di kompleks *SSFC (Sport Science Fitness Centre)* dan kolam renang Unesa, gedung Laboratorium Sains 4 lantai, gedung Laboratorium Teknik dan Kewirausahaan, gedung perpustakaan 6 lantai, gedung CPD 9 lantai, gedung *Student Center* 4 lantai, dan gedung perkuliahan Fakultas Seni dan Desain 4 lantai. Sementara itu, dana GOI IDR 92 miliar akan digunakan untuk pembangunan satu gedung (gedung PAUD dan PLB 4 lantai). Hal tersebut bukanlah tanpa imbalan karena IDB seperti organisasi keuangan yang lain tentunya mengharapkan imbalan dari kampus bukan hanya dalam bentuk dana.

Adanya komersialisasi pendidikan terlihat jelas ketika adanya kebijakan dari kampus untuk menaikkan biaya pendidikan seperti adanya kebijakan BPKP (biaya peningkatan kualitas pendidikan) pada tahun 2011 dan akhir-akhir ini adanya kebijakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) pada tahun 2013. Kebijakan tersebut mau tidak mau yang mengharuskan seorang mahasiswa untuk membayar lebih mahal agar bisa mengenyam pendidikan dibangku kuliah. Kemudian juga konsep Badan Layanan Umum (BLU) yang sudah dijalankan di kampus yang notabene sebagai solusi untuk memecahkan biaya operasional kampus, justru menjadi beban tersendiri bagi mahasiswa. Secara historis konsep BLU lewat Peraturan Pemerintah (PP) no. 66 tahun 2010 lahir sebagai pengganti dari PP no. 17 tahun 2010 yang tertuang dalam UU BHP yang sudah dibatalkan oleh MK.

Dalam pandangan pemerintah, pendidikan khususnya perguruan tinggi dengan berbadan layanan umum akan lebih produktif, efisiensi dan efektif sebagai salah satu layanan publik dengan mengandalkan penganggaran berbasis kerja. Praktek dari BLU yang diterapkan di Unesa sampai sekarang yang terlihat jelas ketika Unesa membuat usaha mandiri untuk mencari dana seperti menjual air mineral, memberikan pajak bagi pedagang yang ada di kampus, penyewaan kolam renang, hingga penyewaan gedung-gedung untuk masyarakat luas.

Sebagai lembaga pendidikan, kampus yang menjadi tempat dari perkembangan ilmu pengetahuan, hanya akan menjadi ruang untuk menacari keuntungan bagi yang para pemodal. Kampus dijadikan ajang untuk mencari keuntungan, demikian pula kampus Unesa, sehingga spirit pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa menjadi terkikis. Seperti yang dipaparkan oleh Ahmad Fahmi bahwa akibat adanya praktik komersialisasi pendidikan, kampus hanya menjadi lembaga pendidikan untuk mencari keuntungan bagi yang mempunyai modal saja, sehingga orientasi dari pendidikan itu bergeser dari untuk mengembangkan nilai-nilai kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial menjadi orientasi profit. Sehingga kemungkinan kalau kemudian banyak mahasiswa juga yang bersifat hedonis dan apatis terhadap lingkungan kampus maupun luar kampus.

Gerakan mahasiswa yang cukup dinamis dalam merespon berbagai kebijakan salah satu wujud dari proses dialektika dan pembelajaran mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas dan kesadarannya sebagai golongan yang diuntungkan oleh situasi. Dalam paradigma sosial mahasiswa dengan demikian harus berorientasi memberikan kontribusi terhadap kebaikan masyarakat. Akan tetapi, jika pendidikan lebih mengutamakan logika untung rugi tentu akan menjadikan mahasiswa cenderung berubah menjadi apatis, tidak peka terhadap perkembangan yang ada dan tergiring berwatak pragmatis dimana mahasiswa hanya selalu mengejar nilai (IPK) dan prestasi akademik saja.

Sejalan dengan itu Ahmad fahmi berpendapat bahwa akibat terjadinya komersialisasi pendidikan, maka mahasiswa cenderung apatis, tidak mau tahu terhadap persoalan lingkungan sosialnya, bahkan juga terhadap persoalan kampusnya sendiri. Mahasiswa sekarang cenderung pragmatis dalam

arti dia mengenyam pendidikan hanya untuk cepat lulus dan cepat kerja, begitu juga sebagai dampak dari kapitalisasi pendidikan mahasiswa menjadi hedonisme, hanya senang mencari hiburan, misalnya nongkrong-nongkrong yang tidak produktif, pergi ke mall, ini semua akibat dari praktik komersialisasi pendidikan yang juga di amini oleh kampus. Sehingga, yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana mahasiswa memasokkan nilai-nilai kesadaran peran dan fungsi mahasiswa yang sebenarnya dalam konteks sebagai masyarakat kampus.

Bentuk Resistensi Gerakan Mahasiswa

Dari pandangan organisasi ekstra kampus terhadap situasi pendidikan atau kampus diatas, menyebabkan timbulnya resistensi dari gerakan mahasiswa, ada beberapa tindakan resistensi yang dilakukan oleh organiasi ekstra kampus (SMI dan GMNI) untuk menyikapi isu-isu yang kemudian mereka angkat.

Berawal dari pembentukan ruang konsolidasi antar organiasi dimulai dengan melakukan diskusi situasi kampus, diskusi dilakukan untuk membangun sebuah konsensus terhadap kebijakan-kebijakan kampus yang dianggap tidak memihak terhadap mahasiswa. Kegiatan diskusi dilakukan didalam kampus, dengan melibatkan semua organisasi eksternal kampus maupun organisasi internal kampus, semua organisasi berhak menyampaikan analisisnya terhadap objek pembahasan hingga muncul perbedaan pandangan maupun kesamaan pandangan. Dari kesamaan pandangan itulah yang kemudian menjadi embrio membentuk suatu aliansi. Aliansi antar organisasi dilakukan untuk membentuk wadah komunikasi untuk melakukan pembahasan tindak lanjut untuk menyikapi isu-isu yang kemudian diangkat.

Hal ini diperkuat dari beberapa pemaparan dari subjek penelitian terkait proses konsolidasi antar organisasi eksternal kampus. Ahmad Shobaki menjelaskan SMI melakukan konsolidasi terhadap organisasi ekstra kampus yang memiliki pandangan yang sama terhadap situasi kampus yang sekarang telah dikapitalisasikan, konsolidasi dilakukan untuk menghimpun kekuatan dengan elemen mahasiswa yang lain yang sesuai dengan kesamaan pandangan, saat ini SMI sedang melakukan konsolidasi dengan salah satu organisasi ekstra yaitu GMNI, konsolidasi ini menyekapati untuk membuat wadah persatuan aliansi yang diberi nama KAM Unesa (Kesatuan Aksi Mahasiwa Unesa).

Kemudian menurut Dimas Anggara konsolidasi yang dilakukan GMNI saat ini dengan organisasi lain hanya SMI yang sampai hingga saat ini mempunyai kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan tersebut kami wujudkan untuk membentuk sebuah wadah persatuan yang kami namakan KAM unesa (Kesatuan Aksi Mahasiswa Unesa). KAM unesa sebagai ruang untuk melakukan komunikasi secara terus menerus dan sebagai media penggalangan massa secara luas.

Dari hasil konsolidasi tersebut kemudian diwujudkan untuk melakukan penyikapan isu-isu yang ada di kampus Unesa dengan aksi-aksi demonstrasi dengan mengangkat isu-isu seperti: "Tolak BPKP (Biaya Kualitas Pendidikan)", "Tolak UKT", dan "Tolak Investor masuk kampus". Penyikapan isu-isu kampus bisa berbentuk penempelan pamflet di tiap mading jurusan kampus Unesa, pamflet tersebut yang berisi tentang kebobrokan birokrasi kampus, kemudian penyebaran selebaran yang dibagikan terhadap mahasiswa luas juga berisikan kritikan-kritikan terhadap kebijakan kampus. Tujuan dalam melakukan penempelan pamflet dan penyebaran selebaran bertujuan untuk membangun kesadaran mahasiswa agar sadar akan kondisi kampus yang sekarang yang seharusnya menjadi perhatian mahasiswa. Kemudian melakukan aksi demonstrasi, demonstrasi dilakukan dengan pengumpulan massa sebanyak-banyaknya dari fakultas ke fakultas yang lain, di setiap fakultas setiap organisasi melakukan orasi, hingga menuju rektorat untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu kampus. Di rektorat, para mahasiswa yang berdemonstrasi dihadang aparat keamanan kampus agar tidak masuk ke dalam gedung rektorat, hanya ada beberapa perwakilan tiap organisasi untuk masuk ke dalam melakukan negosiasi dengan rektor selaku pembuat regulasi-regulasi yang ada di kampus.

Hal tersebut senada diungkapkan oleh subjek Mukhamad Faris, bahwa dari hasil konsolidasi SMI dengan GMNI melakukan penyikapan isu-isu seputar kehidupan kampus, seperti melakukan penempelan pamflet, penyebaran selebaran mengenai kondisi kampus hingga kritiknya terhadap kebijakan-kebijakan yang ditelurkan birokrasi kampus. Penyikapan isu-isu kampus yang sering dilakukan berbentuk aksi demonstrasi yang melibatkan banyak mahasiswa untuk turun ke jalan dengan membawa *bener* berbentuk tuntutan-tuntutan pendidikan di dalam kampus, melakukan

penggalangan massa, melakukan orasi hingga masuk ke gedung rektorat untuk menyampaikan tuntutan yang dibawa.

Dalam pandangan Foucault dapat dijelaskan bahwa kekuasaan bukan melahirkan kepatuhan, melainkan justru melahirkan resistensi. Tidak ada kuasa yang bebas dari oposisi, dimana ada kuasa disitu lah resistensi akan lahir. Foucault memberikan ilustrasi bagaimana kekuasaan untuk melarang itu justru melahirkan resistensi (K. Bertens. 2001:324). Dalam Foucaultian dapat dijelaskan bahwa semakin kuat kekuasaan itu menghegemoni untuk berkuasa, maka dengan sendirinya semakin besar peluang untuk terjadinya resistensi. Sehingga dalam konteks resistensi gerakan mahasiswa merupakan anak kandung dari kekuasaan birokrasi kampus.

Kekuasaan dari birokrasi kampus berjalan ketika birokrasi kampus mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti peningkatan biaya perkuliahan (kebijakan BPKP dan UKT), pelarangan organisasi ekstra kampus untuk melakukan kegiatan di dalam kampus, penarikan investor untuk ikut andil dalam pembangunan infrastruktur. Adanya resistensi yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa dengan melakukan kritikan lewat penempelan pamflet, pembagian selebaran, hingga aksi turun ke jalan merupakan konsekuensi dari kekuasaan birokrasi kampus sebagai pemegang kekuasaan.

Resistensi organisasi ekstra kampus terhadap birokrasi kampus, merupakan bentuk perlawanan sekelompok orang terhadap kelompok lain. Disini merupakan indikasi bahwa adanya kelompok mahasiswa yang tidak ingin begitu saja dikuasai oleh pihak lain. Bahwa mahasiswa ingin ikut andil dalam kekuasaan itu, bahkan ikut dalam menentukan kebijakan. Dalam fenomena resistensi gerakan mahasiswa terhadap kapitalisasi pendidikan yang ada di Unesa, kekuasaan dimengerti dalam penggunaan kekerasan suatu pihak atas pihak lain. Kekuasaan birokrasi kampus sebagai sekelompok orang yang berkuasa memperlakukan organisasi mahasiswa sebagai objek kekuatannya. Relasi kekuatan yang diproduksi oleh birokrasi kampus adalah menunjukkan pihak mahasiswa sebagai pihak yang tidak berdaya, lemah, dan tertindas.

Foucault juga menjelaskan kekuasaan merupakan hasrat dari kebebasan manusia (John Sturrock, 2004:129). Perlawanan protesnya mahasiswa terhadap tekanan yang dipaksakan

birokrasi kampus mengindikasikan bahwa mahasiswa pada dasarnya tidak setuju terhadap kebijakan kampus dan tidak mau dikekang kebebasannya dalam melakukan aktifitas didalam kampus. Hal tersebut juga merupakan hubungan suatu kelompok orang dengan kelompok orang lain yang saling bertentangan. Perlawanan dari organisasi ekstra kampus atas pembatasan dan pembelengguan oleh pihak lain yakni birokrasi kampus merupakan upaya dari organisasi ekstra kampus dalam ikut masuk dalam kekuasaan dari pihak birokrasi kampus, demi mendapatkan kebebasan untuk ikut dalam pembentukan kebijakan.

Peleman Resistensi Gerakan Mahasiswa

Adanya upaya resistensi yang dilakukan beberapa organisasi eksternal kampus diatas yang kemudian dapat dilemahkan oleh birokrasi kampus, agar tidak timbul gejolak-gejolak dari mahasiswa untuk melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan kampus seperti: pemberian wacana mahasiswa liar, wacana Unesa yang akan menjadi *world class university*, banyaknya pembangunan infrastruktur, perkuliahan kewirausahaan, sistem kurikulum yang kompetitif, hingga konflik horizontal dengan organisasi intra kampus.

Adanya wacana mahasiswa liar terhadap para mahasiswa yang melakukan resistensi terhadap kebijakan kampus untuk memberi label mahasiswa yang dianggap mengganggu stabilitas pendidikan. Anggapan birokrasi kampus terhadap organisasi ekstra kampus yang dapat mencoreng nama baik kampus, mahasiswa yang ikut dalam kegiatan seperti ikut dalam aksi demonstrasi perkuliahannya akan cenderung lebih lama untuk lulus dalam perkuliahan. Hal ini yang dapat memperlemah gerakan mahasiswa untuk memobilisasi massa mahasiswa untuk sadar akan permasalahan kampus maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kampus.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh subjek Okto Setyo Beki adanya wacana yang dikembangkan oleh pihak rektorat adanya mahasiswa liar yang tidak memiliki moral dalam pendidikan dan apabila ikut dalam organisasi ekstra semacam itu akan menurunkan kualitas pendidikan ini yang mengakibatkan mahasiswa luas menganggap organisasi ekstra semacam itu harus dijauhi. Hal ini menurut subjek yang menyulitkan organisasi ekstra sulit untuk mengalang massa untuk ikut serta dalam

perjuangan untuk melawan kapitalisasi pendidikan didalam kampus Unesa. Subjek Ahmad Shobaki juga mengungkapkan mahasiswa liar yang terlibat dalam aksi demonstrasi agar tidak merebak kemana, birokrasi Unesa melakukan pengekangan dengan memberikan ancaman DO (droup out).

Selanjutnya visi kampus Unesa yang ingin menjadi kampus *World class university* yang cenderung dipaksakan untuk mengikuti permintaan sistem kapitalisme yang menuntut adanya kesetaraan internasional. Untuk menuju kampus *World class university* kampus membuat kebijakan seperti mempercepat pembangunan, perkuliahan yang mengajarkan kewirausahaan, hingga kurikulum yang berbasis kompetensi.

Banyaknya pembangunan didalam kampus untuk menerapkan kebijakan kampus agar tidak menimbulkan berbagai gejolak yang besar dari mahasiswa pihak birokrasi kampus, seperti pemavingan jalan didalam kampus, merenovasi bangunan yang lama agar terlihat lebih menarik ketika ada mahasiswa yang baru masuk kampus Unesa, membangun waduk sebagai arena rekreasi mahasiswa ketika selesai kuliah, mempercantik taman-taman [ditiap fakultas](#) didalam kampus, membangun lebarotirium di tiap fakultas hingga pembangunan gedung rektorat yang cukup megah.

Banyaknya pembangunan infrastruktur di kampus juga diungkapkan oleh subjek Dimas Anggara bahwa IDB masuk sebagai investor untuk mengintervensi dalam dunia pendidikan, untuk meminimalisir gejolak perlawanan dari mahasiswa atas praktek-praktek kapitalisasi pendidikan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti pembangunan laboratirium di setiap fakultas, pemavingan jalan hingga peremajaan taman-taman. Pembangunan tersebut untuk memperlemah pemikiran kritis mahasiswa bahwa birokrasi Unesa telah memberikan infrastruktur bagi mahasiswa. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak lantas menjadi tanggungjawab negara tetapi menjadi tanggung jawab mahasiswa untuk membiayai dalam membiayai pendidikan.

Selanjutnya adanya perkuliahan kewirausahaan dengan memasukan matakuliah *enterpreneurship* (kewirausahaan), mahasiswa dituntut untuk bisa mandiri membuat usaha mencari laba. Matakuliah tersebut merupakan siasat untuk menamkan nilai-nilai kapitalis yang syarat akan proses akumulasi modal. Hal tersebut yang menjadikan mahasiswa

sibuk akan kegiatan kewirausahaannya tanpa berfikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan kampus.

Mudiono menjelaskan bahwa adanya matakuliah *entrepreneurship* guna memperlancar proses akumulasi modal. Hal tersebut juga sebagai tambal sulam dari ketidak mampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini juga pendidikan hanya mencetak robot-robot bagi industri sebagai penggerak proses produksi.

Adanya sistem pembelajaran yang kompetensi membuat mahasiswa harus berlomba-lomba agar secepatnya lulus dari akademiknya. Birokrasi kampus yang selalu menggerakkan para mahasiswa agar segera menyelesaikan perkuliahannya dengan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang memuaskan, sebagai pencitraan kampus terhadap masyarakat luas untuk menarik peminat yang ingin kuliah di kampus Unesa.

Menurut subjek Mudiono birokrasi kampus Unesa selalu mendengungkan bahwa mahasiswa dianggap berprestasi bila IPK *cumlaude* dengan masa tempuh kuliah 3,5 tahun. Mahasiswa didoktrinasi agar bisa berkompetisi untuk mencari nilai, kampus menjadi ajang unjuk eksistensi bukan ajang intelegensi. Sistem pembelajaran yang kompetensi membuat mahasiswa harus berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai sebaik-baiknya, ingin secepatnya lulus dan memperoleh pekerjaan, pola berpikir mahasiswa ini terpatri sejak mereka akan masuk dalam perguruan tinggi.

Selanjutnya ada juga lagi yang dapat memperlemah resistensi yang dilakukan gerakan ekstra kampus adalah perpecahan gerakan kampus. Perpecahan tersebut merupakan konflik antar organisasi ekstra dengan organisasi intra kampus. Dalam hal ini organisasi SMI dan GMNI sebagai organisasi mahasiswa ekstra kampus yang bertolak belakang dengan kepentingan-kepentingan birokrasi kampus dan BEM Unesa sebagai organisasi intra kampus yang selalu berkompromi dengan regulasi-regulasi yang ditelurkan birokrasi kampus.

Dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan kampus yang merugikan mahasiswa tidak hanya harus berhadapan dengan birokrasi kampus sebagai pembuat kebijakan. Namun organisasi ekstra kampus SMI dan GMNI juga harus berhadapan dengan sesama mahasiswa. Mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang ada didalam BEM Unesa (Badan Eksekutif Mahasiswa

Unesa). BEM Unesa sebagai organisasi mahasiswa intra kampus yang dianggap sah dan legal sebagai penampung dan penyalur aspirasi dari mahasiswa dan saat ini tidak lain adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Beberapa kebijakan yang didukung oleh BEM Unesa seperti: kebijakan BPKP (Biaya peningkatan kualitas pendidikan) dan kebijakan UKT (uang kuliah tunggal) dan juga masuknya investor IDB.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari subjek Ahmad Fahmi bahwa ada perbedaan pandangan organisasi kemahasiswaan. Ini membuat sulitnya menjalin persatuan untuk melakukan resistensi kebijakan-kebijakan kampus yang tidak memihak terhadap mahasiswa. Hal ini menimbulkan konflik horizontal antar mahasiswa yang akhirnya menghambat perlawanan terhadap kebijakan birokrasi kampus. Dalam hal ini BEM Unesa yang tidak lain adalah anak kandung dari birokrasi kampus untuk mensukseskan penerapan kebijakan kampus.

Dari uraian diatas terdapat hubungan hegemoni birokrasi kampus dengan mahasiswa, hegemoni tersebut menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu birokrasi kampus yang bukan hanya berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam instansi pendidikan dalam kepemimpinan rektorat. Sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan dari birokrasi kampus yang didalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat kampus baik secara institusional maupun perorangan. Wacana mahasiswa liar, misi Unesa yang segera *world class university*, banyaknya pembangunan infrastruktur dari investor IDB, pendidikan kewirausahaan, sistem pembelajaran yang kompetitif, hingga adanya konflik horizontal. Semua hal tersebut mendiktekan seluruh pengetahuan, kebiasaan moral, prinsip-prinsip pendidikan yang baik menurut birokrasi kampus, serta seluruh hubungan-hubungan sosial kemahasiswaan, khususnya dalam makna intelektual dan moral untuk menundukkan atau memperlemah resistensi gerakan mahasiswa.

Berdasarkan pemikiran Gramsci tersebut dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar

mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi (Nezar Patria dan Andi Arief, 203:112).

Dengan demikian mekanisme penguasaan birokrasi kampus yang dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah yakni mahasiswa menggunakan pengetahuan yang dipahami birokrasi kampus. Birokrasi kampus merekayasa kesadaran mahasiswa sehingga tanpa disadari, ada kelompok mahasiswa seperti BEM Unesa yang mendukung kekuasaan birokrasi kampus.

Gramsci dalam konsep hegemoninya juga menjelaskan melalui pernyataannya tentang basis dari supremasi kelas, dimana ia menjelaskan bahwasanya supremasi merupakan sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, yakni sebagai “dominasi” dan sebagai “kepemimpinan intelektual dan moral” (Nezar Patria dan Andi Arief, 2003:117). Dalam hal ini adanya satu pihak sebuah birokrasi kampus yang mendominasi kelompok-kelompok oposisi dari mahasiswa yang ada di kampus untuk menundukkan mereka. Bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan represif dari aparat kampus. Di lain pihak birokrasi kampus juga memimpin kelompok-kelompok mahasiswa seperti BEM Unesa yang menjadi sekutu birokrasi kampus dimana kelompok yang menjadi sekutu tersebut harus sudah patuh dan tunduk terhadap kekuasaan kampus. Birokrasi kampus tersebut kemudian menjadi dominasi ketika dia mempraktekkan kekuasaan, sehingga dalam hal ini jelas menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep yang diungkapkan Gramsci diatas tentang kepemimpinan dan dominasi.

Simpulan

Resistensi gerakan mahasiswa terhadap kapitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh organisasi ekstra kampus yakni SMI dan GMNI merupakan perlawanan yang didasarkan atas beroperasinya sistem kapitalisme dalam dunia pendidikan yang ada di Unesa. Dalam pandangan Foucault dapat dijelaskan bahwa kekuasaan bukan melahirkan kepatuhan melainkan justru melahirkan resistensi. Tidak ada kuasa yang bebas dari oposisi, dimana ada kuasa disitulah resistensi akan lahir.

Adanya praktek kapitalisasi pendidikan yang menjadikan pendidikan berorientasi pada keuntungan atau profit, sehingga ini yang

mengakibatkan peserta didik yang akan menjadi korban dari sistem tersebut. Kondisi pendidikan secara nasional dapat dimengerti dari adanya liberalisasi pendidikan yang merupakan konsekuensi dari keikutsertaan negara dalam mekanisme pasar bebas melalui lembaga perdagangan dunia WTO (*World Trade Organisation*) pada tahun 1994, yang menyepakati liberalisasi dunia pendidikan dalam kesepakatan GATS (*General Agreement on Trade in Services*). Hingga terbentuknya otonomi kampus agar bisa mandiri untuk mencari dana secara mandiri.

Dalam konteks kampus Unesa sebagai salah satu kampus di Indonesia juga harus ikut mendukung terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan kepentingan kapitalis. Sebagai wujud liberalisasi pendidikan di Unesa masuknya lembaga keuangan IDB (*Islamic development bank*) sebagai pihak investor untuk melakukan berbagai pembangunan infrastruktur di Unesa dan adanya kerja sama juga dengan BTN (Bank Tabungan Nasional), Bank Jatim, dan BNI (Bank Nasional Indonesia) untuk memenejemen administrasi keuangan kampus. Dan sebagai lembaga yang otonom Unesa membuat usaha mandiri seperti menjual air mineral, penyewaan fasilitas kampus, dan penarikan pajak bagi pedagang yang ada di kantin.

Akibat dari adanya kapitalisasi pendidikan ini yang menimbulkan komersialisasi pendidikan mengakibatkan pendidikan semakin mahal dan hanya mendukung pada kepentingan pemodal serta menempatkan kebijakan pendidikan untuk mendapatkan *profit*. Adanya komersialisasi pendidikan terlihat jelas ketika adanya kebijakan dari kampus untuk menaikkan biaya pendidikan seperti adanya kebijakan BPKP (biaya peningkatan kualitas pendidikan) pada tahun 2011 dan akhirnya ini adanya kebijakan UKT (uang kuliah tunggal) pada tahun 2013. Kebijakan tersebut mau tidak mau yang mengharuskan seorang mahasiswa untuk membayar lebih mahal agar bisa mengenyam pendidikan dibangku kuliah.

Dari persoalan diatas yang mengakibatkan timbulnya resistensi dari mahasiswa yang mengatasnamakan mereka sebagai organisasi SMI dan GMNI yang secara sadar sebagai *agent of change* dan *agent of control*. Paradigma mahasiswa yang harus peka terhadap kondisi lingkungan kampus dan berbagai kebijakan birokrasi kampus yang dapat melakukan pengontrolan hingga

melakukan perubahan. Resistensi dari gerakan mahasiswa ekstra tersebut berbentuk ruang-ruang diskusi untuk membahas berbagai persoalan kampus hingga kebijakan-kebijakan birokrasi kampus, ruang diskusi tersebut sebagai bentuk konsolidasi antar organisasi hingga membentuk sebuah aliansi sebagai wadah persatuan antar organisasi. SMI dan GMNI membentuk wadah persatuan yang dinamakan KAM Unesa karena memiliki pandangan yang sama terhadap pendidikan di Unesa. Setelah terbentuk aliansi dilakukanlah penyikapan dengan melakukan penempelan pamflet, penyebaran selebaran, hingga melakukan aksi demonstrasi terhadap kebijakan-kebijakan kampus seperti: BPKP (biaya peningkatan kualitas pendidikan), UKT (uang kuliah tunggal) dan masuknya IDB (*Islamic Development Bank*).

Adanya hubungan hegemonik birokrasi dengan mahasiswa, menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu birokrasi kampus yang bukan hanya berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam instansi pendidikan dalam kepemimpinan rektorat. Dalam pemikiran Gramsci dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan dari birokrasi kampus, yang didalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat kampus baik secara institusional maupun perorangan untuk melemahkan resistensi dari gerakan mahasiswa. Upaya untuk melemahkan gerakan mahasiswa tersebut seperti: adanya wacana mahasiswa liar, misi Unesa yang segera *world class university*, banyaknya pembangunan infrastruktur dari investor IDB, pendidikan kewirausahaan, sistem pembelajaran yang kompatitif, hingga adanya konflik horizontal, semua hal tersebut mendiktekan seluruh pengetahuan, kebiasaan moral, prinsip-prinsip pendidikan yang baik menurut birokrasi kampus, serta seluruh hubungan-hubungan sosial kemahasiswaan, khususnya dalam makna intelektual dan moral untuk menundukkan atau memperlemah resistensi dari gerakan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahral. 2011. *Setelah Marxisme Sejumlah Teori Ideologi Kontemporer*. Jakarta: Koekoesan.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- K. Bertens. 2001. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia.
- M Dawan Raharja. 1987. *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, Lexy. J.. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2003. *Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sturrock, John . 2004. *Strukturalisme Post-strukturalisme dari Levi-Strauss sampai Derrida* . Surabaya: Jawa Post Press.